



PUTUSAN
Nomor 20 PK/TUN/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

WA RUHANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bone-bone, RT 01/RW 01, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hardodi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HFH Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA,

tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 3 Raha;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jusvantriadi Munawar, S.ST., dan kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKU-600-74.03/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

II. MUHAMAD IDRIS KOWILI (Almarhum),

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Petani/Pekebun, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 67/59/PHR/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dalam hal ini dilanjutkan oleh Ahli Waris **WA RIAN TA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Pekerjaan Petani, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 67/69/D.PHR/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa La Jamuli, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Jamuli, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 00002/BNE/1998, tanggal 21 Agustus 1998, luas 4.947 m², atas nama Muhamad Idris Kowili;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor 00002/BNE/1998, tanggal 21 Agustus 1998, luas 4.947 m², atas nama Muhamad Idris Kowili;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Tergugat:
 - a. Gugatan lewat waktu (kedaluwarsa);
 - b. Kewenangan Absolut (*absolute competentie*);
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 - a. Gugatan lewat waktu (kedaluwarsa);
 - b. Kewenangan Absolut (*absolute competentie*);
 - c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - d. Gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 106/B/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 27 November 2018 dan terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 269 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Wa Ruhani dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks tanggal 27 November 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.Kdi tanggal tanggal 7 Juni 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *aquo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 18 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak diterima karena Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah lewat waktu mengajukan kasasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

demikian pula Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WA RUHANI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)